

KEBIJAKAN *OPEN ACCESS* REPOSITORY INSTITUSI DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI: KAJIAN *BEST PRACTICE* STUDI LITERATURE

Fidan Safira

Universitas Indonesia

Email : fidansafira19@gmail.com

Abstract : *The open-access policy of the repository institutions becomes a guideline. The spirit of open access must be support by information, preservation and copyright. This study discusses transparency and open access to repositories. This research uses the literature study method using qualitative. The policy of open access has not yet been had by most formal university libraries. Content preservation policies and copyright policies. While opportunities for open-access, can increase the use of scientific publications. And the challenges are the resources and commitment of all academicians to contribute.*

Keywords: *Policy, Open Access, Intitutional Repository*

Abstrak : Kebijakan *open access* repository institusi di perpustakaan perguruan tinggi menjadi acuan atau pedoman atas keterbukaan akses yang dijalankan. Semangat keterbukaan akses juga harus didukung dengan kebijakan yang jelas mengenai informasi yang tersedia, pelestarian konten serta hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan keterbukaan akses pada repository institusi serta peluang dan tantangannya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Kebijakan keterbukaan akses belum dimiliki oleh sebagian besar perpustakaan perguruan tinggi secara formal. Utamanya kebijakan preservasi konten dan kebijakan hak cipta. Sedangkan peluang keterbukaan akses adalah dapat meningkatkan keterpakaian publikasi ilmiah dan tantangannya berupa sumber daya serta komitmen dari seluruh sivitas akademika untuk berkontribusi.

Kata Kunci: Kebijakan, *Open Access*, Repository Institusi

PENDAHULUAN

Kebijakan *open access* yang juga dikenal dengan Gerakan *open access* menjadi issue yang booming pada dunia perpustakaan dan kepustakawanan, khususnya perpustakaan perguruan tinggi, beberapa tahun terakhir ini. Perkembangan teknologi yang mendorong keterbukaan informasi yang mudah diakses menjadi salah satu faktor yang memicunya. “*Open access is a digital platform where the research output is store and available/accessible freely to use,*

download and distribute to anyone".¹ Lebih lanjut, *open access* merupakan sebuah sistem berbasis digital yang menyimpan berbagai informasi dalam bentuk digital dan bisa dimanfaatkan secara langsung oleh pengguna baik *full text* maupun *per-review*². Bahwasannya *open access* menjadi salah satu upaya untuk menyediakan dan menyebarluaskan hasil karya akademik suatu institusi, yang dalam hal ini sebagian besar adalah perguruan tinggi, kepada pengguna. Selain itu juga termasuk konten yang berkaitan dengan institusi tersebut.

Pada umumnya, perpustakaan perguruan tinggi menghimpun hasil karya akademik sivitas akademika dalam sebuah repositori institusi. Repositori institusi merupakan *a set of services that a university offers to the members of its community for the management and dissemination of digital materials created by the institution and its community members*³. Repositori institusi menjadi tempat penyimpanan dari setiap publikasi karya ilmiah yang dihasilkan oleh suatu instansi akademik ataupun lembaga pemerintahan. Sebagian besar, pengelolaan repositori institusi sebagian besar berada dibawah tanggung jawab perpustakaan. Hal ini karena perpustakaan dipercaya dalam pengelolaan pengetahuan pada institusi tersebut. Pemanfaatan repositori institusi oleh sivitas akademika dan pemustaka secara luas, bergantung dengan kebijakan *open access* yang berlaku pada institusi tersebut.

Berdasarkan observasi penulis, trend kebijakan *open access* repositori institusi pada perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia hampir sama. Perpustakaan akan memberikan akses bagian tertentu kepada publik, dan bagian lainnya hanya diberikan dengan syarat tertentu. Kebijakan *open access* suatu institusi pasti akan dipengaruhi oleh kebijakan *open access* secara nasional⁴. Tahun 2009, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Riset, Teknologi dan

¹ Ramani Ranjan Sahu and Lambodara Parabhoi, "Open Access Repository: A Comparative Study of Germany, Switzerland and Austria," *Library Philosophy and Practice* 2019 (2019).

² Arina Faula Saufa and Nurrohmah Hidayah, "OPEN ACCESS DAN PERPUSTAKAAN DIGITAL: Tantangan Perpustakaan Dalam Mengelola Repository Di Perguruan Tinggi," *Pustakaloka* 10, no. 1 (2018): 113, <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v10i1.1410>.

³ Clifford A. Lynch, "Institutional Repositories: Essential Infrastructure For Scholarship In The Digital Age," *Portal: Libraries and the Academy* 3, no. 2 (2003): 327–36, <https://doi.org/10.1353/pla.2003.0039>.

⁴ Elizabeth Gadd, Jenny Fry, and Claire Creaser, "The Influence of Journal Publisher Characteristics on Open Access Policy Trends," *Scientometrics* 115, no. 3 (2018): 1371–93, <https://doi.org/10.1007/s11192-018-2716-8>.

Pendidikan Tinggi meluncurkan portal Garuda Dikti. Portal ini diharapkan dapat menjadi portal untuk *knowledge sharing* dan untuk mengekspos publikasi ilmiah jurnal di Indonesia ke dunia global. Lebih lanjut, pada tahun 2019 ini terdapat isu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh kementerian yang sama terkait portal tugas akhir mahasiswa, baik tingkatan sarjana, magister hingga doktoral. Portal yang rencananya akan dinamakan RAMA (Repositori Mahasiswa) ini juga menjadi salah satu isu yang cukup strategis pada perpustakaan perguruan tinggi.

Faktor pemicu lain pentingnya kebijakan *open access* adalah dorongan bagi sivitas akademika agar hasil karya akademik dapat dimanfaatkan oleh publik. Sehingga, kebijakan-kebijakan nasional yang mendorong hal tersebut semakin bermunculan. Misalnya saja dengan adanya pemberian penghargaan bagi dosen atau sivitas akademika dengan h-indeks tertinggi, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan mendeskripsikan mengenai kebijakan *open access* repositori institusi pada perpustakaan perguruan tinggi baik di dalam dan di luar negeri berdasarkan kajian kepustakaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan *open access* repositori institusi pada perpustakaan perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri melalui hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam kebijakan *open access* repositori institusi. Sehingga, dapat menjadi masukan dan pembelajaran bagi perpustakaan perguruan tinggi lainnya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. *Literature study is to analyze critically a segment of a published body of knowledge through summary, classification, and comparison of prior research studies, reviews of literature, and theoretical articles*⁵. Pendekatan kualitatif studi kepustakaan diyakini sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan *open access* terhadap *institutional repository* pada perpustakaan perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan dari literature berupa buku, jurnal, media online dan artikel. Artikel

⁵ Rob Poyck, "Literature Study," 2013.

terpilih yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan konten yang memiliki kesamaan serta kemutakhiran publikasi. Namun, tidak menggunakan sistem pencarian artikel yang sistematis. Sehingga, memudahkan penulis dalam melakukan analisa data. Namun tidak dapat digeneralisasikan pada kelompok kata kunci pada satu database tertentu. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif berupa kodifikasi, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun pada tahap reduksi dan penyajian data, penulis menggunakan teknik literature review yang mencakup mencari kesamaan (*compare*), mencari ketidaksamaan (*contrast*), memberikan pandangan (*criticize*), membandingkan (*synthesize*), dan meringkas (*summarize*)⁶.

KAJIAN TEORI

Kebijakan Informasi

Istilah kebijakan informasi sebagai semua kebijakan yang meliputi undang-undang, peraturan, dan berbagai doktrin serta keputusan lain dan prakteknya dalam masyarakat beserta efek menyeluruh bagi konstitusi yang melibatkan penciptaan informasi, pengolahan, arus, akses dan penggunaannya⁷. Kebijakan informasi dibentuk karena adanya tiga kepentingan, yaitu: kepentingan ilmiah, kepentingan pekerja profesional, dan kepentingan politik⁸. Lebih lanjut, menjelaskan adanya tingkatan hirarki dalam kebijakan informasi⁹, yaitu:

1. Kebijakan Infrastruktural yang berlaku secara luas di masyarakat baik yang berpengaruh langsung maupun tidak pada kebijakan informasi, seperti undang-undang pekerja, kebijakan pendidikan, dan lain sebagainya.
2. Kebijakan informasi horizontal yang secara khusus diaplikasikan dan berdampak langsung pada sektor informasi, seperti undang-undang proteksi data, kebijakan penyediaan perpustakaan umum, dan pajak terhadap buku.

⁶ and Matthew B. Miles A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methodes Source Book*, 3th ed. (USA: SAGE Publications, 2014).

⁷ Sandra Braman, "Defining Information Policy," *Journal of Information Policy* 1 (2011): 1-5.

⁸ Ian Rowlands, *Understanding Information Policy: Concepts, Frameworks and Research Tools* (Berlin: DE GRUYTER SAUR, 1997).

⁹ Rowlands.

3. Kebijakan informasi vertikal yang berlaku untuk sektor informasi tertentu, misalnya peraturan berbagi informasi dikalangan komunitas tertentu.

Kebijakan informasi dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari empat jenis kebijakan, yaitu kebijakan kerja, kebijakan informasi tentang institusi yang berurusan dengan IR, kebijakan pelestarian konten, dan kebijakan hak cipta¹⁰.

Selanjutnya, dirumuskan taksonomi tentang nilai yang ingin ditegakkan melalui kebijakan informasi. Nilai tersebut terbagi dalam empat aspek¹¹, yaitu:

1. Aspek kedaulatan, aspek ini menunjukkan bahwa kebijakan informasi yang berlaku menjamin kesatuan sosial dengan menjamin konsensus dalam komunikasi. Selain itu, aspek ini juga menjamin kebebasan akses individu untuk mengambil keputusan.
2. Aspek transformasi, kebijakan informasi yang berlaku mendukung pengembangan pengetahuan bersama di dalam masyarakat. Selain itu, secara individu aspek ini menjamin kebebasan individu untuk berkembang sesuai kebutuhannya.
3. Aspek produksi, kebijakan informasi yang berlaku menjamin ketersebaran produksi informasi secara merata di masyarakat. Selain itu, aspek ini juga menekankan pentingnya proteksi kepemilikan informasi pribadi.
4. Aspek global, Aspek ini menunjukkan bahwa kebijakan informasi yang berlaku dapat mendukung penciptaan komunikasi yang terbuka dan lancar tanpa melihat batas sosial-politik. Selain itu, aspek ini secara individu memperbolehkan penggunaan IT untuk pengembangan kebudayaan.

Nilai-nilai tersebut ditekankan pada masyarakat dan kepada individu sebagai anggota komunitas. Sehingga, baik masyarakat maupun individu yang terlibat dalam komunitas, dapat memahami aspek nilai dari kebijakan informasi yang diberlakukan. Kebijakan informasi harus dimulai dan diakhiri dengan memperhatikan efek konstitusi dan konstitusional dalam pengambilan keputusan yang melibatkan informasi¹².

¹⁰ Guillermo Pérez and Ailín Martínez, "La Ciencia Como Empresa Social: Su Evaluacion Desde La Bibliometría," *Biblios* 55, no. 1 (2014): 13, <https://doi.org/10.5195/biblios.201>.

¹¹ Putu Laxman Pendit, "Ragam Teori Informasi," *Eprints*, no. September (2006): 16–21.

¹² Braman, "Defining Information Policy."

Open access atau Keterbukaan Akses

Open access diartikan sebagai akses terbuka ke publikasi ilmiah melibatkan pemanfaatan teknologi dan manajemen hak penulis untuk meningkatkan manfaat pengetahuan baru¹³. Istilah *open access* ini muncul pada desember 2001 pada Konferensi di Open Society Institute yang kemudian juga menginisiasi *Budapest Open access Initiative* (BOAI, www.soros.org/openaccess). Pernyataan resmi mengenai inisiasi ini dirilis tanggal 14 Februari 2002. Dalam rilis disebutkan bahwa *open access* memungkinkan distribusi *peer reviewed journal* secara gratis dan tanpa batasan akses untuk semua ilmuwan, pelajar, guru, dan semua yang membutuhkan. *Open access* ini hadir karena kesediaan akademisi untuk menerbitkan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah tanpa membayar. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan akses sepenuhnya. Selain itu, kegiatan *open access* ini diharapkan mampu mempercepat diseminasi informasi¹⁴.

Diseminasi informasi karya akademisi atau institusi dapat dilakukan dengan kebijakan *open access* yang relevan dengan kebutuhan. Berikut merupakan bentuk-bentuk *open access*¹⁵, yaitu:

1. *Gold Open access*, yaitu konten dapat diakses secara bebas, pendanaan dibayar oleh penulis ketika proses penerbitan artikel.
2. *Hybrid Model*, yaitu pembaca harus berlangganan, penulis bayar jika memilih agar artikelnya bisa dibuka secara *open access*.
3. *Green Open access*, yaitu penulis diijinkan untuk melakukan *self-archiving* (pengarsipan mandiri) dari bentuk postprint/ preprint.
4. *Gray open access*, yang dapat diakses tanpa bayar, penulis tidak diijinkan untuk melakukan self-archiving
5. *Toll Access*. Pengguna diharuskan membayar untuk mendapatkan akses, tidak terbuka untuk *open access*.
6. *Gratis Open access (zero price)*. Tidak bayar, namun harus ada ijin penggunaan.

¹³ Peggy Johnson, *Fundamentals of Collection Development and Management*, 4th ed. (Chicago: ALA, 2018).

¹⁴ Johnson.

¹⁵ Johnson.

7. *Libre Open access*. Tidak bayar dan tidak perlu ada ijin.

Open access sebagai salah satu upaya diseminasi informasi juga memiliki isu-isu terkait pelaksanaannya. Terdapat tiga isu utama, yaitu terkait kepemilikan dan hak cipta karya yang dibuka, fee atau pembayaran jika ada, serta kualitas dari karya yang dibuka¹⁶.

Open access membantu melindungi hak-hak pengguna atas karya tulis yang telah dibuat untuk suatu kebaikan yang lebih besar¹⁷. Berbeda halnya dengan perpustakaan perguruan tinggi Universitas Negeri Malang memilih tidak membuka keseluruhan repositori institusi karena berkaitan dengan kualitas karya yang dihasilkan oleh sivitas akademiknya¹⁸. Lebih lanjut, setidaknya ada enam faktor yang mempengaruhi individu dalam berpartisipasi dan menggunakan *open access* repositori institusi. Keenam faktor tersebut adalah faktor latar belakang pendidikan, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengaruh usia dan jabatan, kualitas publikasi di *open access* repositori institusi tersebut, dan kebijakan terkait *open access* repositori institusi¹⁹.

Repositori Institusi (*Institutional Repository*)

Institutional repository atau repositori institusi merupakan repositori permanen, di seluruh institusi dari beragam karya digital yang diproduksi secara lokal (misalnya, artikel cetak, kumpulan data tesis dan disertasi elektronik, objek pembelajaran, multimedia dan audiovisual, dan laporan teknis) yang tersedia untuk pemustaka dan mendukung pemanenan metadata (Johnson, 2014). Lebih lanjut, banyak repositori pendidikan tinggi dikelola oleh perpustakaan perguruan tinggi perpustakaan atau oleh perpustakaan bermitra dengan unit administrasi, seperti kantor penelitian. Sebagai ruang publik, perpustakaan digital dan *institutional repository* memungkinkan untuk dikunjungi oleh berbagai anggota masyarakat,

¹⁶ Johnson.

¹⁷ Richard E; Bopp and Linda C. Smith, *Bopp, Richard E Dan Linda C. Smith. (Reference*, 4th ed. (USA: ABC-CLIO, LLC, 2013).

¹⁸ Dwi Novita Ernarningsih, "Institutional Repository Access Policy: A Case Study in State University of Malang Library," *Record and Library Journal* 3, no. 1 (2018): 25, <https://doi.org/10.20473/rlj.v3-i1.2017.25-37>.

¹⁹ Iswanda F Satibi et al., "Sikap Pemerintah Daerah Terhadap Repositori Institusi Dan Open Access," no. August 2017 (2017): 93–103.

baik dari dalam dan dari luar kampus. *Institutional repository* dapat menjadi bagian dari sistem penerbitan dan publikasi universitas yang bersifat terbuka bagi sivitas akademika.²⁰

Pengembangan repositori institusi menurut Gibbons²¹ terdapat tujuh langkah utama, yaitu: (1) merumuskan alasan pengembangan, (2) menetapkan tujuan dari *repository*, (3) menetapkan layanan *repository*, (4) memilih perangkat lunak yang tepat untuk *repository*, (5) mengembangkan kebijakan tertulis, (6) membangun komunitas, dan (7) mempromosikan *repository*. Langkah-langkah tersebut tidak serta merta dapat berjalan dengan baik. Prayesti,²² menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan repositori institusi, yaitu: motivasi dan tujuan pengembangan, kesinambungan infrastruktur, manajemen penyimpanan dan pengembangan konten, kebijakan pengembangan dan pendanaan. Guna memaksimalkan pengembangan *repository* institusi, berikut rekomendasi untuk membuat repositori institusional²³:

1. Promosi komprehensif dan publisitas tentang manfaat repositori institusi ke pengajar dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Kebijakan yang jelas tentang kepemilikan, konten repositori institusi, kualitas standar, masalah hak cipta, dan lain sebagainya;
3. Kebijakan keperpustakaan perguruan tinggi yang ketat yang mewajibkan penyimpanan semua penelitian staf output dan disertasi dan tesis mahasiswa;
4. Pengakuan bahwa repositori institusi adalah proyek yang sedang berjalan;
5. Visi, strategi, dan arah yang jelas;
6. Berbagai layanan dukungan akademik dan penelitian termasuk email permintaan e-print dan setoran akses tertutup;
7. Dukungan berkelanjutan dari manajemen dan akademisi;

²⁰ Amirul Ulum and Eko Setiawan, "Analisis Konten Dan Kebijakan Akses Institutional Repository," *Pustakaloka* 8, no. 1 (2016): 157–74.

²¹ Nancy Fried Foster and Susan Gibbons, "Understanding Faculty to Improve Content Recruitment for Institutional Repositories.," *Online Submission* 11, no. 1 (2005).

²² Meinia Prayesti et al., "Faktor Pengembangan Repositori Institusi Di Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pengembangan Repositori Institusi Di Kabupaten Pamekasan," in *Seminar Nasional & Call For Papers Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Negeri Malang*, 2017.

²³ Johnson, *Fundamentals of Collection Development and Management*..

8. Sumber daya yang memadai (keuangan, teknologi, personalia);
9. Insentif untuk mendorong pengajar untuk menyimpan dalam repositori keperpustakaan perguruan tinggi;

Selain itu, pustakawan dapat meningkatkan penyimpanan dalam repositori institusi melalui:²⁴

1. Meningkatkan mekanisme pemilihan konten;
2. Menugaskan penghubung untuk menjangkau pengajar yang dapat memberikan konten;
3. Menawarkan untuk menyimpan bahan elektronik untuk penulis;
4. Mengirim pengumuman melalui email;
5. Merekrut adaptor untuk menyimpan konten;
6. Mengadakan pertemuan dan lokakarya untuk sosialisasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *open access* repositori institusi di perpustakaan perguruan tinggi dapat dilihat dari empat jenis kebijakan, yaitu kebijakan kerja, kebijakan informasi tentang institusi yang berurusan dengan repositori institusi, kebijakan pelestarian konten, dan kebijakan hak cipta. Artikel ini akan mengulas keempat analisa kebijakan, cara mengukur kebijakan, serta peluang dan tantangan dari kebijakan *open access* repositori institusi dalam lima artikel jurnal terpilih. Lima artikel jurnal ini dipilih berdasarkan kesesuaian konten dengan tujuan penelitian ini serta untuk mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai kondisi kebijakan keterbukaan akses repositori institusi di beberapa negara.

Adapun kelima artikel yang akan diulas merupakan artikel dari dalam dan luar negeri dengan terbitan tiga tahun terakhir. Kelima artikel ini mencakup mengenai kondisi kebijakan *open access* pada repositori institusi di perpustakaan perguruan tinggi serta peluang dan tantangannya. Rincian artikel dapat dilihat pada Tabel 1.

²⁴ Johnson.

Tabel 1. Artikel yang Digunakan dalam Penelitian ini

Judul	Penulis	Tahun	Tujuan	Metode
<i>Open access institutional repositories in Latin America</i>	Michelli Pereira da Costa; Fernando César Lima Leite	2019	Mengidentifikasi dan menggambarkan karakteristik repositori institusional di Amerika Latin dan kontribusinya bagi pengembangan akses terbuka.	Penelitian Kuantitatif Deskriptif
Kebijakan Akses Institutional Repository: Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Negeri Malang	Dwi Novita Ernarningsih	2017	1). Memahami dan mengidentifikasi kebijakan akses dan aksesibilitas ke repositori institusi di UPT Perpustakaan Univeristas Negeri Malang. 2). Mengidentifikasi hambatan penerapan akses terbuka di UPT Perpustakaan Univeristas Negeri Malang. 3). Menganalisis pandangan pemangku jabatan terhadap repositori institusi akses terbuka.	Penelitian Kualitatif Studi Kasus
<i>Open access Institutional Repositories in Universities in East Africa</i>	Miriam Kakai; Maria G.N Museko; Constant Okello-Obura	2018	Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan capaian yang telah dicapai universitas di Afrika Timur dalam memulai repositori institusional (IR), tantangan dalam menyediakan akses terbuka dan strategi untuk kedepannya.	Penelitian Kualitatif Studi Kepustakaan
<i>Open access Repository: A Comparative Study of Germany, Switzerland and Austria</i>	Ramani Ranjan Sahu; Lambodara Parabhoi	2019	Studi komparasi dari <i>Open access Repository</i> (OARS) di antara tiga negara Eropa Austria Jerman, Swiss yang terdaftar di situs web <i>Open access Repository Ranking</i> (OARSR) (http://repositoryranking.org).	Penelitian komparatif dengan data dari <i>open access repository</i> dan analisa deskriptif.
<i>Measuring Open access Policy Compliance: Results of a Survey</i>	Shannon Kipphut-Smith; et. al	2018	Pertanyaan tentang topik seperti alur kerja kebijakan, kegiatan penilaian, dan tantangan memunculkan berbagai tanggapan.	Penelitian Kuantitatif deskriptif

Sumber: Hasil Olahan Penulis, (2019)

Artikel pertama adalah hasil penelitian Perez dan Martinez yang membahas mengenai keterbukaan akses repositori institusi di perpustakaan perguruan tinggi di Amerika Latin. Artikel ini mengidentifikasi jumlah repositori institusi di Amerika Latin, orientasinya, konten dokumen di dalamnya, yang mencakup ukuran, jenis dokumen, cakupan bidang ilmu, dan teknologi yang digunakan. Terakhir artikel ini juga menjelaskan mengenai kebijakan keterbukaan akses repositori institusi berdasarkan empat jenis kebijakan, yaitu kebijakan kerja,

kebijakan informasi institusi, kebijakan pelestarian, dan hak cipta²⁵. Sedangkan artikel kedua yang merupakan artikel dalam negeri oleh Ernaningsih, mendeskripsikan kebijakan keterbukaan akses repositori institusi di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang serta tantangan yang dihadapi²⁶.

Artikel selanjutnya adalah hasil penelitian Kakai, Museko, dan Okello-Obura, dimana artikel ini menjelaskan capaian perpustakaan perguruan tinggi di Afrika Timur dalam keterbukaan akses repositori institusi tantangan serta prospek kedepannya. Sedangkan artikel Sahu dan Parabhoi lebih menjelaskan mengenai perbandingan tiga negara, yaitu Jerman, Switzerland, dan Austria dalam pengembangan keterbukaan akses repositori institusi. Artikel ini tidak banyak membahas mengenai kebijakan keterbukaan akses repositori institusi. Artikel ini hanya bersifat deskriptif kuantitatif, namun cukup memberikan gambaran atas kondisi kebijakan keterbukaan akses repositori institusi yang ada di tiga negara tersebut²⁷. Artikel terakhir yang merupakan tulisan Kipphut-Smith, et. al, lebih menunjukkan alat dan metode yang seharusnya dilakukan perpustakaan perguruan tinggi dalam mengukur kebijakan keterbukaan akses repositori institusi²⁸.

Kebijakan *Open access* Repositori Institusi di Perpustakaan Perguruan Tinggi

Berdasarkan kelima artikel tersebut, identifikasi mengenai kebijakan informasi dalam *open access* repositori institusi. Hasil penelitian Sahu dan Parabhoi, menunjukkan bahwa 181 perpustakaan perguruan tinggi yang memiliki repositori institusi dalam sample penelitiannya, 40,89% memiliki kebijakan terkait *open access* repositori institusinya. Sedangkan 59,11% lainnya tidak memiliki kebijakan terkait *open access* repositori institusinya. Kebijakan yang ada sudah termasuk kebijakan terkait metadata, kebijakan data, kebijakan konten, kebijakan preservasi, dan kebijakan hak cipta. Artikel ini memang tidak memuat secara rinci konten dari masing-masing kebijakan tersebut. Namun, berdasarkan data ini dapat

²⁵ Pérez and Martínez, "La Ciencia Como Empresa Social: Su Evaluacion Desde La Bibliometria."

²⁶ Ernaningsih, "Institutional Repository Access Policy: A Case Study in State University of Malang Library."

²⁷ Miriam Kakai, Maria G.N. Musoke, and Constant Okello-Obura, "Open Access Institutional Repositories in Universities in East Africa," *Information and Learning Science* 119, no. 11 (2018): 667–81, <https://doi.org/10.1108/ILS-07-2018-0066>.

²⁸ Shannon Kipphut-Smith et al., "Measuring Open Access Policy Compliance: Results of a Survey," *Journal of Librarianship and Scholarly Communication* 6, no. 1 (2018): 0–38, <https://doi.org/10.7710/2162-3309.2247>.

dilihat bahwasanya di Jerman, Switzerland, dan Austria masih banyak perpustakaan perguruan tinggi yang sudah membuka akses repositori institusinya, namun belum memiliki kebijakan terkait pengelolaannya²⁹.

Begitu pula dengan artikel dari Kipphut-Smith; et. al, menjelaskan bahwa dari 36 perpustakaan perguruan tinggi yang menjadi responden penelitian ini, empat responden menunjukkan mengadopsi kebijakan *open access* dari COAPI atau *Coalition of Open access Policy Institutions*, sedangkan enam perpustakaan perguruan tinggi lainnya tidak memberikan responnya³⁰. Ernaningsih, yang menunjukkan bahwa Perpustakaan Universitas Negeri Malang juga sudah menerapkan kebijakan akses terbuka atas repositori institusinya. Akses dapat diberikan di internal perpustakaan, sedangkan pengguna dari luar perpustakaan hanya dapat mengakses bab 1, 2, dan 5 dari koleksi. Sedangkan bab 3 dan 4 dapat diakses berdasarkan permintaan yang diakomodasi melalui prosekur tertentu. Repositori institusi ini tidak menyediakan fitur unduh dan copy. Meski demikian, Perpustakaan Universitas Negeri Malang belum memiliki kebijakan secara tertulis terkait hal tersebut³¹. Lebih lanjut, penelitian Kakai, Museko, dan Okello-Obura, hanya menjelaskan adanya prioritas kebijakan *open access* repositori institusi secara fulltext pada dua universitas dari empat universitas yang menjadi sample penelitian. Kedua universitas ini adalah Universitas Kenyatta dan Universitas Makerere³².

Universitas Kenyatta memulai akses terbuka dari repositori institusinya dengan abstrak dari database disertasi. Kebijakan mengenai tesis dan disertasi mahasiswa dilakukan dengan mengunggah soft copy karya mahasiswa yang lulus. Kemudian perpustakaan akan mendigitalkan tesis cetak secara retrospektif dan membuatnya dapat diakses melalui repositori institusi. Universitas Makerere mendigitalkan dan mengunggah tesis dan disertasi ke repositori institusi. Hal ini dilakukan dengan sebelumnya menyelesaikan persetujuan penulis dan mengatur

²⁹ Sahu and Parabhoi, "Open Access Repository: A Comparative Study of Germany, Switzerland and Austria."

³⁰ Kipphut-Smith et al., "Measuring Open Access Policy Compliance: Results of a Survey."

³¹ Ernaningsih, "Institutional Repository Access Policy: A Case Study in State University of Malang Library."

³² Kakai, Musoke, and Okello-Obura, "Open Access Institutional Repositories in Universities in East Africa."

konten yang dibatasi pada repositori institusi, dan menganjurkan untuk self-archiving tesis dan disertasi dalam kebijakan repositori institusinya.

Perez dan Martinez menyebutkan terdapat empat jenis kebijakan informasi yang berkaitan dengan *open access* repositori institusi³³. Berdasarkan identifikasi dalam kelima artikel pada tabel 1, tidak semua artikel menunjukkan hasil mengenai keempat jenis kebijakan informasi ini. Adapun konten artikel yang menunjukkan hasil tersebut akan dirinci pada penjelasan berikut ini.

Kebijakan kerja

Kebijakan kerja dapat menjadi alat untuk memvalidasi proses pengembangan repositori institusi, meliputi proses administratif dan proses yang berkaitan dengan kebijakan perpustakaan perguruan tinggi yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut juga merupakan mekanisme perencanaan dan dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai kinerja sistem. Artikel Ernaningsih menunjukkan bahwa kebijakan kerja *open access* repositori institusi di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang berupa tersedianya tenaga pengelola, perangkat keras (*hardware*) perangkat lunak (*software*) dan jaringan. Tenaga pengelola repositori institusi berjumlah empat orang yaitu seorang pembuat program (*programmer*), *system analyst*, teknisi, dan pengunggah (*uploader*)³⁴. Hal ini sama halnya dalam penelitian Kakai, Museko, dan Okello-Obura yang menunjukkan bahwa kebijakan kerja dalam pengelolaan *open access* repositori institusi diprakarsai oleh perpustakaan universitas dan didukung dengan tenaga teknologi informasi yang berkompeten dari universitas dan pendanaan dari universitas dan donor³⁵.

³³ Pérez and Martínez, "La Ciencia Como Empresa Social: Su Evaluacion Desde La Bibliometría."

³⁴ Ernaningsih, "Institutional Repository Access Policy: A Case Study in State University of Malang Library."

³⁵ Kakai, Musoke, and Okello-Obura, "Open Access Institutional Repositories in Universities in East Africa."

Kebijakan informasi tentang institusi

Kebijakan informasi tentang institusi merupakan dokumen yang menyajikan pedoman atau aturan akademik dari anggota perpustakaan perguruan tinggi tertentu yang diklasifikasikan sebagai kebijakan perpustakaan perguruan tinggi. Kebijakan institusional berisi dokumen penting formalisasi komitmen yang dibuat dengan repositori oleh perpustakaan perguruan tinggi pengelola. Dokumen tersebut ditandatangani oleh pimpinan perpustakaan perguruan tinggi seperti rektor atau direktur. Artikel Perez dan Martinez, menunjukkan 11 perpustakaan perguruan tinggi memberikan akses terbuka atas kebijakan informasi tentang institusi terkait di Amerika Latin. Sembilan perpustakaan perguruan tinggi tersebut berasal dari Brasil dan dua lainnya berasal Argentina³⁶. Sedangkan Ernaningsih, menunjukkan bahwa repositori institusi Universitas Negeri Malang tidak memiliki konten mengenai kebijakan informasi institusi. Hal ini dikarenakan penyimpanan konten lokal institusi yang masih berpecah di banyak tempat yang berbeda³⁷.

Kebijakan pelestarian konten

Kebijakan pelestarian merupakan aspek penting dalam pengembangan repositori institusi. Kebijakan pelestarian mewakili perencanaan dan komitmen repositori dalam menyimpan dokumen-dokumen sepanjang tahun. Artikel Perez dan Martinez menunjukkan hanya terdapat sembilan perpustakaan perguruan tinggi yang memiliki kebijakan ini dalam pengembangan repositori institusinya. Sembilan perpustakaan perguruan tinggi tersebut, delapan diantaranya terdapat di Brasil dan satu di Argentina³⁸. Penelitian Ernaningsih, menunjukkan belum adanya upaya pelestarian konten agar dapat diakses dalam jangka waktu yang lama. Upaya pelestarian konten pun juga belum dilakukan terhadap karya tokoh-tokoh besar institusi³⁹. Lebih lanjut, artikel Kakai, Museko, dan Okello-Obura, menjelaskan bahwa kebijakan *open access* repositori institusi di Universitas Makerere mendorong adanya *self archiving* sebagai bentuk preservasi konten pada repositori

³⁶ Pérez and Martínez, "La Ciencia Como Empresa Social: Su Evaluacion Desde La Bibliometria."

³⁷ Ernaningsih, "Institutional Repository Access Policy: A Case Study in State University of Malang Library."

³⁸ Pérez and Martínez, "La Ciencia Como Empresa Social: Su Evaluacion Desde La Bibliometria."

³⁹ Ernaningsih, "Institutional Repository Access Policy: A Case Study in State University of Malang Library."

institusi. Sedangkan tiga universitas lain yang menjadi sample penelitian ini tidak memiliki kebijakan terkait hal tersebut⁴⁰.

Kebijakan hak cipta

Kebijakan hak cipta disini berupa dokumen mengenai ketentuan hukum untuk setoran, akses, dan penggunaan materi yang tersedia diklasifikasikan dalam kategori ini. Repositori institusi menerima hak untuk menyediakan dokumen-dokumen tertentu secara bebas dan tanpa batasan akses. Berdasarkan penelitian Perez dan Martinez, diantara 32 negara yang menjadi sampel penelitian, ditemukan bahwa ada enam perpustakaan perguruan tinggi dari Argentina yang sudah memiliki kebijakan terkait hak cipta, empat perpustakaan perguruan tinggi dari Meksiko, dua perpustakaan perguruan tinggi dari Chili, dan dua perpustakaan perguruan tinggi dari Kolombia. El Salvador, Peru, dan Trinidad serta Tobago masing-masing hanya memiliki satu kebijakan. Selanjutnya, Kosta Rika, Kuba, Ekuador, Jamaika, dan Venezuela, seperti jenis lainnya, tidak memiliki kebijakan hak cipta dalam pengelolaan repositori institusinya⁴¹. Sedangkan artikel Kakai, Museko, dan Okello-Obura, menunjukkan hanya Universitas Makerere yang mempertimbangkan hak cipta dalam kebijakan *open access* repositori institusi. Hal ini dilakukan dengan penulis memberikan kesediannya dan perpustakaan menjamin hal tersebut⁴².

Mengukur Keberhasilan Kebijakan *Open Access* Repositori Institusi

Penelitian yang dilakukan oleh Kipphut-Smith; et. al⁴³, dengan jumlah responden sebanyak 42 perpustakaan perguruan tinggi dari anggota COAPI (*Coalition of Open access Policy Institutions*) menunjukkan bahwa 43% responden melaporkan bahwa institusi mengukur keberhasilan kebijakan *open access*. Penilaian dilakukan baik secara formal maupun informal. Banyak perpustakaan perguruan tinggi melakukan kegiatan penilaian untuk tujuan pelaporan. Responden mengindikasikan bahwa penting untuk melapor ke sejumlah pemangku

⁴⁰ Kakai, Musoke, and Okello-Obura, "Open Access Institutional Repositories in Universities in East Africa."

⁴¹ Pérez and Martínez, "La Ciencia Como Empresa Social: Su Evaluacion Desde La Bibliometría."

⁴² Kakai, Musoke, and Okello-Obura, "Open Access Institutional Repositories in Universities in East Africa."

⁴³ Kipphut-Smith et al., "Measuring Open Access Policy Compliance: Results of a Survey."

kepentingan di kampus terkait kebijakan *open access*. Sedangkan delapan responden melaporkan bahwa tidak mengukur keberhasilan kebijakan *open access*. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya dan/ atau kepegawaian untuk melakukan pengukuran.

Terdapat dua cara yang dilakukan oleh perpustakaan perguruan tinggi dalam mengukur kebijakan *open access* repositori institusinya. Cara tersebut adalah metode dari record yang terdapat dalam sistem serta dengan pendekatan kualitatif. Tanggapan survei menunjukkan bahwa kegiatan yang paling umum adalah melacak jumlah artikel yang disetor (24%), melacak unduhan artikel yang disimpan (19%), dan melacak tingkat setoran artikel (15%). Pengukuran dilakukan melalui kegiatan seperti mengumpulkan cerita tentang manfaat kebijakan *open access* (14%) dan menggunakan *focus group* untuk mengukur perubahan dalam sikap peneliti terhadap *open access* (3%). Lebih lanjut, baik dalam survei dan wawancara lanjutan, responden menjelaskan bahwa perpustakaan juga bergantung pada beberapa alat untuk mengidentifikasi publikasi dan melacak permintaan serta setoran artikel. Responden menggunakan Web of Science dan Scopus untuk mengidentifikasi artikel. Beberapa institusi melacak dan menganalisis hasil survey dengan spreadsheet atau database perpustakaan perguruan tinggi.

Peluang dan Tantangan *Open access* Repositori Institusi di Perpustakaan Perguruan Tinggi

Ernaningsih menunjukkan bahwa semangat keterbukaan akses pada repositori instusi di Perpustakaan Universitas Negeri Malang adalah karena tingginya pertumbuhan karya ilmiah sivitas akademika dalam bentuk tercetak yang dihasilkan setiap tahunnya dan dalam rangka mengikuti trend Webometrics⁴⁴. Sedangkan penelitian Kakai, Museko, dan Okello-Obura, menunjukkan bahwa semangat keterbukaan akses pada repositori institusi di Afrika Timur dikarenakan untuk mendukung komunikasi ilmiah perpustakaan melalui penyediaan sumber informasi ilmiah⁴⁵. Hal tersebut tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh Sahu

⁴⁴ Ernaningsih, "Institutional Repository Access Policy: A Case Study in State University of Malang Library."

⁴⁵ Kakai, Musoke, and Okello-Obura, "Open Access Institutional Repositories in Universities in East Africa."

dan Parabhoi⁴⁶, serta Perez dan Martinez⁴⁷ dalam artikelnya, bahwa perpustakaan perguruan tinggi baik di Jerman, Switzerland, Austria dan Amerika Latin memiliki semangat keterbukaan akses repositori institusi adalah agar dapat memberikan akses luas atau diseminasi informasi atas hasil penelitian sivitas akademika. Hal ini tentu untuk mendorong agar masyarakat luas dapat menggunakan hasil penelitian tersebut, sehingga dapat meningkatkan sitasi dan h-indeks sivitas akademika.

Selain peluang, terdapat pula tantangan yang dirasakan oleh perpustakaan perguruan tinggi dalam mengembangkan keterbukaan akses repositori institusi ini. Disampaikan oleh Ernaningsih, bahwa tantangan utamanya di Perpustakaan Universitas Negeri Malang adalah perbedaan pandangan pimpinan institusi terkait keterbukaan akses⁴⁸. Hal ini juga berkaitan dengan integritas akademik yang berlaku pada institusi tersebut. Selain itu, juga faktor kelayakan dan kualitas hasil penelitian sivitas akademika yang dirasa belum memenuhi standar. Berbeda halnya dengan penelitian Kipphut-Smith, et. al, yang menjelaskan bahwa tantangan utama keterbukaan akses dalam repositori institusi adalah terbatasnya staff dan sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan perguruan tinggi untuk menerapkan dan mengukur kebijakan akses terbuka⁴⁹.

Lebih lanjut, artikel Kakai, Museko, dan Okello-Obura, mengidentifikasi bahwa tantangan dalam keterbukaan akses justru berasal dari peneliti dan dosen pengajar yang lebih mempercayai penggunaan sistem *open access* jurnal dan platform media sosial untuk mempublikasikan hasil karya penelitiannya, dari pada melalui repositori institusi⁵⁰. Penelitian Lovett, et. al⁵¹, mendukung alasan tersebut, hal ini ditemukan bahwa akademisi di Universitas Rhode Islands cenderung memilih untuk mempublikasikan hasil karya penelitiannya pada situs terbuka, seperti ResearchGate dan Academia.edu dari pada melalui repositori institusi meskipun aksesnya terbuka. Salah satu alasan para akademisi tersebut antara lain karena platform akses terbuka seperti ResearchGate dan Academia.edu lebih

⁴⁶ Sahu and Parabhoi, "Open Access Repository: A Comparative Study of Germany, Switzerland and Austria."

⁴⁷ Pérez and Martínez, "La Ciencia Como Empresa Social: Su Evaluacion Desde La Bibliometría."

⁴⁸ Ernaningsih, "Institutional Repository Access Policy: A Case Study in State University of Malang Library."

⁴⁹ Kipphut-Smith et al., "Measuring Open Access Policy Compliance: Results of a Survey."

⁵⁰ Kakai, Musoke, and Okello-Obura, "Open Access Institutional Repositories in Universities in East Africa."

⁵¹

memudahkan berjejaring dengan peneliti lain, bahkan dari institusi yang berbeda. Selain itu, juga dapat meningkatkan visibilitas dan impact dari karya penelitian serta tersedianya perhitungan statistik atas jumlah pengguna yang mengunduh hasil karya penelitian yang dipublikasikan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Prayesti⁵², menunjukkan bahwa alasan akademisi di Kabupaten Pamekasan untuk tidak berpartisipasi dalam keterbukaan akses repositori institusi adalah ketakutan akademisi atas penyalahgunaan terhadap karya, terutama terkait hak cipta dan *plagiarism* dan ketakutan akademisi atas kritik terhadap karya ilmiah yang dihasilkan. Sedangkan alasan akademisi di Kabupaten Pamekasan untuk berpartisipasi dalam keterbukaan akses repositori institusi adalah karena repositori institusi memfasilitasi versi lain dari karya ilmiah yang dihasilkan supaya dapat diakses secara luas; tersedianya tempat publikasi terhadap karya ilmiah yang tidak dapat dipublikasikan melalui jurnal (misal; gambar, poster, dan lain sebagainya), dapat mengurangi biaya dan tenaga dalam penerbitan karya ilmiah, dan meminimalisir biaya untuk mengakses karya ilmiah.

Hasil penelitian ini mendukung konsep bahwasanya isu dari adanya keterbukaan akses repositori institusi adalah isu fee atau pembayaran, isu hak cipta atas karya yang dibuka, serta isu atas kualitas dari karya yang dibuka. Penelitian Prayesti⁵³ menunjukkan bahwa akademisi di Kabupaten Pamekasan cenderung tidak yakin atas hasil publikasi ilmiah yang dihasilkan. Ketidakyakinan tersebut menyebabkan keengganan para akademisi untuk terlibat dalam repositori institusi. Lebih lanjut, belum adanya regulasi yang jelas terkait kebijakan hak cipta juga membuat para akademisi di Kabupaten Pameksan enggan untuk melibatkan karyanya dalam repositori institusi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan informasi, terutama terkait hak cipta menjadi penting atas pelaksanaan keterbukaan akses atas repositori institusi. Namun, hasil kajian yang disampaikan dalam artikel ini, tidak banyak perpustakaan perguruan tinggi yang telah memiliki kebijakan tersebut.

⁵² Meinia Prayesti et al., "Faktor Pengembangan Repositori Institusi Di Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pengembangan Repositori Institusi Di Kabupaten Pamekasan," *Seminar Nasional Dan Call For Paper: Rekonstruksi Pustakawan Di Era Digital*, no. November (2017): 113–22.

⁵³ Prayesti et al.

PENUTUP

Keterbukaan akses repositori institusi di perpustakaan perguruan tinggi seakan menjadi salah satu layanan yang harus tersedia saat ini. Semangat perpustakaan perguruan tinggi baik untuk meningkatkan webometrics ataupun untuk mendukung diseminasi karya ilmiah sivitas akademika juga harus memperhatikan kebijakan keterbukaan akses secara formal. Identifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar perpustakaan perguruan tinggi belum memiliki kebijakan keterbukaan akses yang jelas. Terutama kebijakan terkait preservasi konten digital dan kebijakan hak cipta. Lebih lanjut, mengukur pelaksanaan kebijakan juga penting untuk melihat hasil yang didapatkan dan pemanfaatan oleh pengguna. Namun, sebagian besar perpustakaan perguruan tinggi belum melakukan hal ini. Keterbukaan akses repositori intitusi juga memiliki tantangan dalam pengembangannya. Tantangan dapat berupa komitmen institusi dan ketersediaan sumber daya, yang mencakup: manusia, infrastruktur dan dana yang mendukung. Lebih lanjut, tantangan juga dapat berupa keterlibatan akademisi dalam pengembangan konten pada repositori institusi sendiri dari pada menggunakan platform akses terbuka seperti *ReserachGate* dan *Academia.edu*. Kelemahan artikel ini tidak menunjukkan secara sistematis proses pemilihan artikel yang digunakan dalam penelitian. Penulis melibatkan kesamaan konten artikel, ketidaksamaan konten artikel serta perbandingan dari masing-masing artikel, sehingga lebih mudah dalam melakukan analisa.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Michael Huberman, Johnny Saldana, and Matthew B. Miles. *Quallitative Data Analysis: A Methodes Source Book*. 3th ed. USA: SAGE Publications, 2014.
- Bopp, Richard E., and Linda C. Smith. *Bopp, Richard E Dan Linda C. Smith. (Reference)*. 4th ed. USA: ABC-CLIO, LLC, 2013.
- Braman, Sandra. "Defining Information Policy." *Journal of Information Policy* 1 (2011): 1–5.
- Ernaningsih, Dwi Novita. "Institutional Repository Access Policy: A Case Study in State University of Malang Library." *Record and Library Journal* 3, no. 1 (2018): 25. <https://doi.org/10.20473/rlj.v3-i1.2017.25-37>.

- Foster, Nancy Fried, and Susan Gibbons. "Understanding Faculty to Improve Content Recruitment for Institutional Repositories." *Online Submission* 11, no. 1 (2005).
- Gadd, Elizabeth, Jenny Fry, and Claire Creaser. "The Influence of Journal Publisher Characteristics on Open Access Policy Trends." *Scientometrics* 115, no. 3 (2018): 1371–93. <https://doi.org/10.1007/s11192-018-2716-8>.
- Johnson, Peggy. *Fundamentals of Collection Development and Management*. 4th ed. Chicago: ALA, 2018.
- Kakai, Miriam, Maria G.N. Musoke, and Constant Okello-Obura. "Open Access Institutional Repositories in Universities in East Africa." *Information and Learning Science* 119, no. 11 (2018): 667–81. <https://doi.org/10.1108/ILS-07-2018-0066>.
- Kipphut-Smith, Shannon, Michael Boock, Kimberly Chapman, and Michaela Willi Hooper. "Measuring Open Access Policy Compliance: Results of a Survey." *Journal of Librarianship and Scholarly Communication* 6, no. 1 (2018): 0–38. <https://doi.org/10.7710/2162-3309.2247>.
- Lynch, Clifford A. "Institutional Repositories: Essential Infrastructure For Scholarship In The Digital Age." *Portal: Libraries and the Academy* 3, no. 2 (2003): 327–36. <https://doi.org/10.1353/pla.2003.0039>.
- Pendit, Putu Laxman. "Ragam Teori Informasi." *Eprints*, no. September (2006): 16–21.
- Pérez, Guillermo, and Ailín Martínez. "La Ciencia Como Empresa Social: Su Evaluacion Desde La Bibliometría." *Biblios* 55, no. 1 (2014): 13. <https://doi.org/10.5195/biblios.201>.
- Poyck, Rob. "Literature Study," 2013.
- Prayesti, Meinia, Iswanda F. Satibi, Achmad Rizki, Dewi Soraya, and Novi Anggraini. "Faktor Pengembangan Repositori Institusi Di Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pengembangan Repositori Institusi Di Kabupaten Pamekasan." In *Seminar Nasional & Call For Papers Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Negeri Malang*, 2017.
- Prayesti, Meinia, Iswanda F Satibi, Achmad Rizki, Dewi Soraya, and Novi Anggraini. "Faktor Pengembangan Repositori Institusi Di Pemerintah Daerah : Studi Kasus Pengembangan Repositori Institusi Di Kabupaten Pamekasan." *Seminar Nasional Dan Call For Paper : Rekonstruksi Pustakawan Di Era Digital*, no. November (2017): 113–22.
- Rowlands, Ian. *Understanding Information Policy: Concepts, Frameworks and Research Tools*. Berlin: DE GRUYTER SAUR, 1997.
- Sahu, Ramani Ranjan, and Lambodara Parabhoi. "Open Access Repository: A Comparative Study of Germany, Switzerland and Austria." *Library Philosophy and Practice* 2019 (2019).

- Satibi, Iswanda F, Meinia Prayesti, Puput Ayu R, and Sofia Nur Aisyah. “Sikap Pemerintah Daerah Terhadap Repositori Institusi Dan Open Access,” no. August 2017 (2017): 93–103.
- Saufa, Arina Faula, and Nurrohmah Hidayah. “OPEN ACCESS DAN PERPUSTAKAAN DIGITAL: Tantangan Perpustakaan Dalam Mengelola Repository Di Perguruan Tinggi.” *Pustakaloka* 10, no. 1 (2018): 113. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v10i1.1410>.
- Ulum, Amirul, and Eko Setiawan. “Analisis Konten Dan Kebijakan Akses Institutional Repository.” *Pustakaloka* 8, no. 1 (2016): 157–74.